
6-30-2009

PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA

Nuryaman Nuryaman
Universitas Widyatama

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

Recommended Citation

Nuryaman, Nuryaman (2009) "PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 6: Iss. 1, Article 5.

DOI: 10.21002/jaki.2009.05

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol6/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia

Volume 6 - Nomor 1, Juni 2009

PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA

Nuryaman

Universitas Widyatama, Bandung

nuryaman.nuryaman@gmail.com

Abstract

The background phenomena of this study is the fact that low disclosure practice on the financial reporting. The objectives of the research are to find out empirical evidence of the effect of ownership concentration, firms size, and corporate governance mechanisms on voluntary disclosure. The corporate governance mechanisms of this research are composition of board of commissioner and audit quality. Audit quality were measure by industry specialize audit firm. This study is explanatory research. The samples are on purposive samping method, and in conformity with the following criteria: (a) the annual report ended 31 December 2005; (b) book value of equity is positive. There were 101 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The research hyphotesis were tested using multiple regression analysis. The result of this research show that: (1) ownership concentration has significantly positive influence on voluntary disclosure; (2) firms size has significantly positive influence on voluntary disclosure; (3) composition of board of commissioner has no influence on voluntary disclosure; (4) audit quality, significantly and positively influenced voluntary disclosure.

Keywords: *ownerships concentration, firms size, corporate governance mechanisms, voluntary disclosure.*

PENDAHULUAN

Informasi pada laporan keuangan dan laporan tahunan sangat membantu investor dalam pengambilan keputusan transaksi investasi di pasar modal. Bagi pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan media

informasi untuk mengetahui kondisi perusahaan. Sejauh mana informasi dapat diperoleh tergantung pada sejauh mana keterbukaan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) pada pelaporan keuangan emiten.

Sepanjang tahun 2004 sampai dengan Maret 2005, Bapepam dan LK mencatat ada 44 kasus pelanggaran pasar modal, 42% di antaranya adalah perusahaan manufaktur. Dari 44 kasus pasar modal tersebut terdapat 26 kasus (60 %) menyangkut benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan (Bapepam dan LK 2005). Benturan kepentingan dan tidak diungkapkannya informasi penting akan menyebabkan kerugian bagi pihak investor eksternal.

Hasil survey *Pricewaterhouse and Coopers* terhadap investor-investor internasional di Asia (FCGI 2004), menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terendah dalam bidang standar pengungkapan dan transparansi, serta penerapan auditing. Posisi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya dan Australia dalam hal praktek pengungkapan dalam laporan keuangan, Indonesia dikelompokkan pada kelompok paling buruk bersama dengan Thailand, China, dan India.

Apabila dilihat dari sudut pandang teori keagenan, rendahnya pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan timbul sebagai dampak persoalan keagenan, yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen (Beneish 2001). Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*). *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas 2004). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal, yaitu: struktur kepemilikan yang salah satu aspeknya adalah konsentrasi kepemilikan saham, struktur dewan komisaris yang salah satu aspeknya adalah komposisi dewan komisaris, dan mekanisme eksternal, yaitu: pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, serta audit oleh auditor eksternal (Babic 2001).

Pengungkapan informasi yang kurang memadai dapat merugikan pemegang saham selain bahwa informasi yang disajikan tersebut dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah, oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela. Faktor-faktor tersebut adalah konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dalam hal ini adalah komposisi dewan komisaris dan kualitas audit oleh auditor eksternal dengan proksi spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (KAP).

Penelitian terdahulu mengenai struktur kepemilikan sebagai mekanisme *corporate governance* di Indonesia lebih menekankan pada konsentrasi kepemilikan saham secara kelompok dengan hasil yang berbeda. Penelitian Midyastuty (2003) menunjukkan konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme *corporate governance*, sedangkan Budiwitjaksono (2005) menyimpulkan sebaliknya. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan terdapatnya konflik kepentingan antar pemegang saham. Hasil penelitian Musnadi (2006) menunjukkan konsentrasi kepemilikan oleh individu dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat dijadikan mekanisme *corporate governance*. Dalam penelitian ini digunakan konsentrasi kepemilikan oleh individu atau kepemilikan terbesar sebagai ukuran konsentrasi kepemilikan saham.

Siregar (2006) menggunakan ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit pada penelitiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan kualitas audit oleh auditor eksternal dengan proksi ukuran KAP memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, kualitas audit tidak efektif sebagai mekanisme *corporate governance*. Penelitian ini akan menggunakan spesialisasi industri KAP sebagai proksi kualitas audit.

Ketika penelitian ini dilakukan, di Indonesia belum banyak ditemukan penelitian tentang hubungan komposisi dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela. Penelitian Susilowati et al. (2005) menggunakan data perusahaan publik berskala besar (30 perusahaan besar) di Indonesia dan Australia, hasilnya menunjukkan terdapat hubungan positif antara komposisi dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela. Namun demikian, dikarenakan sampel penelitian tersebut hanya terdiri atas perusahaan berskala besar, maka sesuai dengan saran peneliti terdahulu diperlukan penelitian lanjutan.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan pada perusahaan. Gunawan (2000) menguji hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan sukarela di BEI, hasilnya menunjukkan terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan. Sementara di lain pihak, hasil penelitian Halim et al. (2005) menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sukarela. Dari hasil penelitian yang belum konsisten ini diperlukan penelitian lanjutan.

Hasil penelitian Baridwan (2001) dikutip dari Utami (2005) menunjukkan bahwa indeks pengungkapan dari 100 sampel laporan keuangan emiten tahun 2000 rata-rata adalah 96%, artinya emiten telah memenuhi pengungkapan 96% dari 721 *item* yang wajib diungkapkan menurut standar akuntansi dan peraturan Bapepam dan LK. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan praktek pengungkapan wajib sudah ditaati oleh emiten, sehingga penelitian tentang pengungkapan akan lebih *relevance* pada aspek pengungkapan sukarela.

Pengungkapan informasi akan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sebagai efek dari efisiensi pasar modal. Beberapa hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pengungkapan sukarela berguna untuk mengurangi kesenjangan informasi antar para pelaku pasar modal, sehingga investor percaya bahwa transaksi saham di pasar modal terjadi pada harga yang wajar. Kepercayaan investor ini kemudian akan diikuti dengan peningkatan likuiditas saham (Jiambalvo 1996) dan penurunan biaya modal (Botosan 1997).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal: (1) penelitian ini menekankan pada konsentrasi kepemilikan oleh individu sebagai mekanisme *corporate governance*. Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia lebih menekankan pengujian pada kepemilikan saham oleh kelompok tertentu sebagai suatu mekanisme *corporate governance*; dan (2) penelitian terdahulu di Indonesia (Siregar 2006) menggunakan ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit. Penggunaan proksi ukuran KAP mendapat kritikan setelah merebaknya kasus Enron yang melibatkan KAP besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara spesifik dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut: (1) apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?; (2) apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?; (3) apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?; dan (4) apakah kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara *continental Europe*. Sebaliknya, di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat menyebar (La Porta dan Silanez 1999). Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya (Dallas 2004).

Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas *monitoring*, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk

mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen (Hubert dan Langhe 2002). Jika ini dapat diwujudkan, maka tindakan *moral hazard* manajemen berupa menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

Lakhal (2004) berpendapat, konsentrasi kepemilikan saham dapat mempengaruhi luas pengungkapan pada laporan keuangan. Menurutny, pada perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi, pihak *insider* yaitu pemegang saham pengendali kurang tertarik dengan pengungkapan sukarela, karena mereka dapat mengakses langsung informasi tanpa melalui laporan keuangan, sehingga konsentrasi kepemilikan saham diduga berhubungan negatif dengan pengungkapan sukarela. Namun sebaliknya, Haniffa (2003) dan Mohd (2005) menyatakan bahwa untuk mengurangi asimetri informasi, maka pemegang saham pengendali akan meningkatkan pengungkapan informasi untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Peningkatan kepemilikan saham, akan berbanding lurus dengan *cash flow* terhadap pemegang saham. Jika harga saham atau nilai perusahaan turun maka pemegang saham pengendali yang paling banyak merasakan dampak kerugian dari penurunan nilai perusahaan tersebut. *Capital markets transactions hypothesis* (Healy dan Palepu 2000) menghipotesiskan bahwa ketika manajemen/pemegang saham pengendali perusahaan berada pada posisi *superior information*, maka akan menimbulkan asimetri informasi antara pemegang saham pengendali/manajemen dengan pemegang saham minoritas. Tingginya asimetri informasi akan meningkatkan biaya modal sehingga akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut, oleh karena itu pemegang saham pengendali harus menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dengan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi guna mengurangi asimetri informasi.

H₁: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* di masa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para *stakeholder* untuk

menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Marwata (2001), Haniffa dan Cooke (2002), dan Leung (2005). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela. Halim et al. (2005) meneliti hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan sukarela dengan sampel 37 perusahaan kelompok LQ 45 data tahun 2001. Hasilnya menyimpulkan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif yang lemah dengan pengungkapan sukarela. Tetapi dari segi metodologi, sampel penelitian Halim (2005) kurang representatif.

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Problem keagenan terjadi ketika timbul konflik antara tujuan pemilik (prinsipal) dengan para direksi/ *top management* sebagai agen. Para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh manajemen. Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme yang mampu mensejajarkan kepentingan pemegang saham selaku pemilik dengan kepentingan manajemen. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan bisnisnya (Tjager 2003).

Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*. Pengendalian diarahkan pada pengawasan perilaku manajer, sehingga tindakan yang dilakukan manajer dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemilik (Monk dan Minow 2001). Babic (2005) menyatakan bahwa sistem *corporate governance* dapat berbeda tergantung pada bagaimana mekanisme pemilik perusahaan mempengaruhi manajer. Secara umum, mekanisme *corporate governance* terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) *The internal mechanisms of corporate governance*; dan (2) *The external mechanisms of corporate governance*.

Mekanisme internal adalah cara-cara pengendalian perusahaan dengan menggunakan berbagai elemen yang ada di dalam organisasi, misalnya komposisi dewan komisaris. Mekanisme eksternal adalah cara-cara mengendalikan perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan, diantaranya menghadirkan para agen yang dikenal karena reputasinya (*reputational agent*), dalam hal ini termasuk “profesi akuntan” (World Bank 1999). Faktor eksternal dimaksudkan untuk mendisiplinkan perilaku pihak *insider* agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola korporasi.

Peranan dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, salah satunya adalah komposisi keanggotaannya. Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari komposisinya, apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari dalam perusahaan dan/atau dari luar perusahaan. Komposisi keanggotaan dewan, dalam hal ini semakin besar persentase anggota yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) akan menjadikan peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena dianggap semakin independen. Di Indonesia, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan menggunakan terminologi komisaris “ekstern” atau “independen”.

Barnhart dan Rosenstein (1998) membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outside director*, maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *board of director* dalam menjalankan perannya. Selain itu, komisaris independen dapat berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan para pemegang saham dalam rangka melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Penelitian Willekens et al. (2003), Lueng (2005), Cheng dan Courteney (2004), dan Susilowati et al. (2005) memberikan kesimpulan bahwa komposisi komisaris independen di perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen pada komposisi keanggotaan dewan komisaris, maka akan semakin luas pengungkapan sukarela perusahaan (berhubungan positif).

H₃: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Eksternal auditor dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen. Sebagai *reputational agent*, akuntan melakukan audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan manajemen. Oleh karena itu, dilihat dari sisi hubungan keagenan, maka eksternal auditor merupakan agen yang bekerja untuk kepentingan prinsipal.

IAI dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA No.4 tahun 1994) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang cukup memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor. Dari penjelasan tersebut, nampak bahwa agar akuntan eksternal berperan optimal, maka harus memberikan jasa audit berkualitas. Kualitas audit dapat dipenuhi jika audit dilakukan oleh auditor kompeten dan independen. Dengan demikian, kompetensi dan independensi merupakan dimensi dari kualitas audit. Chen et al. (2005) mengembangkan dua dimensi kualitas audit. Pertama, kualitas audit adalah audit yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian informasi keuangan. Kedua, salah saji yang material pada laporan keuangan harus disajikan pada laporan audit.

Menurut Dunn dan Mayhew (2004), kualitas audit dengan menggunakan proksi spesialisasi industri KAP dapat mempengaruhi pengungkapan pada laporan keuangan. Auditor spesialis industri dapat membantu perusahaan klien dalam penyajian pengungkapan di luar yang dipersyaratkan oleh GAAP. *Industry specialist auditor* yang memiliki pengetahuan dan keahlian industri tertentu dapat dimanfaatkan secara *cost effective* oleh klien untuk membantu klien dalam mengembangkan strategi pengungkapan spesifik industri. Pemilihan auditor spesialis juga merupakan sinyal (isyarat) terhadap investor bahwa perusahaan bermaksud menyajikan pengungkapan informasi berkualitas. Penelitian mereka memberikan kesimpulan bahwa spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan.

H4 : Spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik sektor manufaktur yang aktif selama tahun 2005, yaitu sebanyak 137 perusahaan (www.bapepam.go.id). Dari populasi tersebut sampel ditentukan, yaitu perusahaan-perusahaan yang memenuhi empat kriteria sebagai berikut: (1) Emiten mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember 2005; (2) Emiten mempunyai nilai ekuitas positif untuk tahun 2005; (3) Tersedia laporan keuangan tahunan emiten di BEJ untuk tahun 2005; dan (4) Terdapat minimal 30 perusahaan dalam setiap kelompok industri manufaktur. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian sebanyak 101 perusahaan.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsentrasi Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham terkonsentrasi (KS) adalah suatu kondisi di mana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu/kelompok sehingga individu atau kelompok tersebut memiliki jumlah saham relatif dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Konsentrasi kepemilikan saham pada penelitian ini diproksi dengan jumlah kepemilikan terbesar oleh individu.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (LOG PNJ) adalah besar kecilnya perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan nilai log total penjualan perusahaan pada akhir tahun. Penggunaan nilai log penjualan dimaksudkan untuk menghindari problem data natural yang tidak berdistribusi normal (Chen 2005).

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris (BOD) adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Variabel proporsi komisaris independen ini merupakan hasil bagi jumlah komisaris independen terhadap jumlah total anggota Komisaris.

Spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik (KAP)

Spesialisasi industri KAP (AUDIT) menggambarkan keahlian dan pengalaman audit KAP pada bidang industri tertentu, yang diproksi dengan konsentrasi jasa audit KAP pada bidang industri tertentu. Spesialisasi industri KAP pada penelitian ini adalah KAP_{*i*} yang memiliki volume klien minimal 15% dari jumlah klien pada kelompok industri tertentu (Craswell 1995; Mayangsari 2003; Chen 2005b). Pengukuran variabel ini yaitu beri nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP spesialis, dan 0 jika lainnya (variabel *dummy*). Berdasarkan definisi Craswell (1995), industri manufaktur di BEJ (BEI) terklasifikasi dalam tiga kelompok, yaitu industri: (1) dasar dan kimia; (2) aneka industri; dan (3) barang konsumsi. Kemudian pada masing-masing kelompok tersebut, suatu KAP akan ditetapkan sebagai KAP spesialis jika KAP tersebut memiliki klien minimal 15% dari jumlah klien perusahaan pada masing-masing kelompok industri manufaktur.

Pengungkapan Sukarela

Pelaporan keuangan (*financial reporting*) lebih luas dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan berbagai informasi tambahannya. *Financial reporting* meliputi laporan keuangan itu sendiri ditambah berbagai suplemennya dalam berbagai bentuk agar dapat memberikan gambaran keuangan dan operasi perusahaan secara memadai untuk kepentingan pemakai laporan keuangan.

Dalam SFAC No.5 dijelaskan bahwa *financial reporting* mencakup: (1) *Basic financial statement*; (2) *supplementary information*; dan (3) *Other means of financial reporting*. *Basic Financial Statement* meliputi: (1) *Statement of financial position*; (2) *Statement of earnings and comprehensive income*; (3) *Statement of cash flow*; (4) *statement of invesment by and distributions to owners*; dan (5) *Notes to Financial Statement*. *Basic financial statement* inilah yang harus taat pada standar akuntansi dan merupakan laporan yang diaudit.

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK no.1, par.7) terdiri dari komponen-komponen: (a) neraca; (b) laporan laba-rugi; (c) laporan perubahan

ekuitas; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi (PSAK no.1 par.10)

Selain laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, perusahaan juga dianjurkan untuk memberikan informasi tambahan. Informasi tambahan yang dianjurkan meliputi: (1) telaah keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan; (2) posisi keuangan perusahaan; (3) kondisi ketidakpastian; (4) laporan mengenai lingkungan hidup; dan (5) laporan nilai tambah (PSAK no.1 par.8,9). Informasi tambahan yang relevan dan diperlukan dapat disajikan pada laporan tahunan perusahaan.

Dari sumber PSAK tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh standar akuntansi.
2. Informasi lain (informasi tambahan) merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai. Informasi tambahan ini dapat disajikan pada laporan tahunan.

Selain diharuskan menerbitkan laporan keuangan, perusahaan juga diminta untuk menyampaikan laporan tahunan. Badan regulasi (Bapepam dan LK) telah menerbitkan acuan tentang informasi yang harus ada (*mandatory*) pada penyampaian laporan tahunan, yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor.VIII G.2/1996. Dengan demikian, informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan informasi yang diharuskan menurut ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK; (2) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Di luar yang diharuskan oleh peraturan adalah merupakan pengungkapan sukarela manajemen.

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) menurut Choi (1999) adalah praktik pengungkapan yang tidak diharuskan oleh standar akuntansi dan regulasi. Praktik pengungkapan sukarela dari studi komparatif beberapa negara dapat meliputi (Choi 1994, 1999) :

1. *Disclosure of forward-looking information;*
 - a. *Forecasts of revenue, income, eps, capital, expenditure and other financial item*

- b. Prospective information about future economic performance or position that is less definite than forecast in terms in projected item, fiscal periode, and projected amount*
- c. Statement of management's plans and objective for future operations*
- 2. *Social responsibility disclosure*
- 3. *Special disclosure for non domestic financial statement users*
- 4. *Employee disclosure*
- 5. *Value added disclosure*
- 6. *Enviromental concern*

PSAK dan SFAC secara implisit menyebutkan bahwa kualitas pengungkapan terkait dengan relevansi informasi yang diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar. Kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dikenal dengan berbagai konsep, antara lain kecukupan (*adequacy*), kelengkapan (*completeness*), informatif (*informativeness*), dan tepat waktu (*timeliness*) (Marwata 2001).

Imhoff (1992) menunjuk pada tingkat kelengkapan (*completeness*) sebagai karakteristik kualitas pengungkapan. Indikator empirisnya berupa indeks pengungkapan (*disclosure index*) yang merupakan rasio antara jumlah elemen (*item*) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang mungkin dipenuhi. Makin tinggi indeks pengungkapan, makin tinggi kualitas pengungkapan.

Penelitian ini dibatasi pada upaya untuk melihat tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela perusahaan publik sektor manufaktur di Indonesia sebagai salah satu dimensi kualitas pengungkapan. Penelitian ini tidak mengukur kejelasan/kerincian pengungkapan serta ketepatan waktu pengungkapan.

Instrumen pengukuran pengungkapan sukarela dalam penelitian ini dirancang dengan mengacu pada peraturan Bapepam dan LK Nomor.VIII G.2 /1996 tentang penyampaian laporan tahunan yang akan dimodifikasi dengan instrumen dari: (1) penilaian laporan tahunan perusahaan publik (*annual report award*) dari Bapepam (2005); (2) Khomsiyah dan Utami (2005); (3) Botosan (1997); (4) Chau and Gray (2002); serta (5) Suripto dan Baridwan (1999).

Dalam penelitian ini, kelengkapan pengungkapan diukur dengan *item* pengungkapan tanpa memberikan pembobotan. Pemakaian pendekatan tersebut didasarkan pada dua alasan : (1) laporan tahunan didasarkan untuk tujuan umum, sehingga terdapat kemungkinan suatu *item* informasi penting untuk pihak tertentu tetapi tidak penting untuk pihak lain; dan (2) untuk menghindari subjektivitas

pemberian bobot kepada masing-masing *item* pertanyaan pada instrumen pengungkapan.

Perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan sukarela (PS) dilakukan dengan memberi skor untuk setiap *item* pengungkapan secara dikotomis. Jika suatu *item* diungkapkan diberi skor 1, dan jika tidak diungkapkan mendapat nilai 0. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. PS dihitung sebagai berikut :

$$PS = \frac{\sum Q}{\sum S} \times 100 \%$$

Keterangan :

PS = Indeks kelengkapan pengungkapan sukarela

Q = *Item* kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan dalam laporan tahunan

S = Semua *item* kelengkapan pengungkapan sukarela yang diharapkan, terdapat pada instrumen.

Data pengungkapan sukarela diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

Variabel Pengendali

Penelitian sebelumnya menunjukkan pengungkapan sukarela berhubungan positif dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on invesment* (ROI) (Eng dan Mak 2003; Susilowaty 2005; Mohd et al. 2005). Profit adalah berita baik (*good news*) sehingga manajer termotivasi memperluas pengungkapan untuk menyampaikan berita baik tersebut.

Penelitian sebelumnya menunjukkan *leverage* berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela (Lueng et al. 2005; Eng dan Mak 2003; Botosan 2002). Perusahaan yang memiliki komposisi hutang yang tinggi dituntut untuk memberikan informasi yang lebih luas oleh kreditur.

Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal di BEI berupa laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2005 perusahaan industri sektor manufaktur yang tersedia.

Rancangan Model Analisis

Rancangan model analisis menggunakan regresi berganda sebagai berikut :

$$PS_i = a + d_1 KS + d_2 LOG PNJ_i + d_3 BOD_i + d_4 AUDIT_i + d_5 ROI + d_6 LEV + \varepsilon_{2,i}$$

dimana :

PS	= Indeks pengungkapan sukarela
a	= Konstanta
$d_{1,2,3,4,5,6}$	= Koefisien variabel ke-1 sampai dengan 6
KS	= Persentase kepemilikan saham terbesar dari total saham beredar
LOG PNJ	= Log total penjualan, yaitu proksi dari ukuran perusahaan
BOD	= Proporsi komisaris independen dari total anggota Dewan Komisaris
AUDIT	= <i>Dummy variabel</i> , 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis, yaitu KAP _i yang memiliki pangsa pasar minimal 15% klien perusahaan dari jumlah klien pada kelompok industri tertentu, dan 0 jika lainnya.
ROI	= Laba bersih dibagi total aset
LEV	= Total hutang dibagi total ekuitas
$\varepsilon_{2,it}$	= <i>residual of error</i>
i_t	= perusahaan ke i

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Seperti disajikan pada Tabel 1, sampel penelitian ini berjumlah 101 perusahaan atau 73,7% dari 137 emiten manufaktur populasi target peneliti ini. Jumlah ini ditentukan sesuai dengan laporan tahunan yang berhasil diperoleh penulis, serta memenuhi kriteria sampel seperti yang ditetapkan.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa konsentrasi kepemilikan saham di industri manufaktur relatif tinggi. Rata-rata konsentrasi kepemilikan saham sebesar 50,11% dengan standar deviasi 23,03%. Statistik deskriptif ukuran perusahaan menunjukkan log total penjualan sangat variatif dengan rata-rata 5,79 dengan standar deviasi 0,61. Rata-rata komposisi dewan komisaris (BOD) sebesar 35,88% dengan standar deviasi 11,34%. Komposisi minimum 0% dan komposisi maksimum 66,66%. Penelitian Budiwijaksono (2005) melaporkan rata-rata komposisi dewan komisaris pada tahun 2001 dan 2002 masing-masing 35,03% dan 37,35%. Jika komposisi tersebut diperbandingkan, tampak komposisi dewan komisaris pada emiten industri manufaktur tidak mengalami perubahan signifikan. Pengungkapan sukarela (PS)

Tabel 1
Persentase Perusahaan Sampel Menurut Jenis Industri

No.	Kelompok & Sub Industri Manufaktur	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sampel	Persentase Sampel
Industri Dasar dan Kimia				
1.	Semen	3	2	66,70%
2.	Keramik dan Porselin	5	4	80%
3.	Logam dan Sejenisnya	10	9	90%
4.	Kimia	10	10	100%
5.	Plastik dan Kemasan	11	8	72,73%
6.	Pakan Ternak	4	3	75%
7.	Kayu & Pengolahannya	5	4	80%
8.	Pulp & Kertas	5	3	60%
Aneka Industri				
9.	Otomotif & Komponennya	15	11	80%
10.	Tekstil dan Garmen	21	9	42,86%
11.	Alas Kaki	3	1	33,33%
12.	Kabel	6	4	66,67%
Barang Konsumsi				
13.	Makanan & Minuman	17	14	82,35%
14.	Rokok	4	3	75%
15.	Farmasi	10	8	80%
16.	Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga	3	3	100%
17.	Peralatan Rumah Tangga	5	5	100%
Jumlah Total		137	101	73,7 %

menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan hanya 37,51%, artinya pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan hanya berkisar 37,51% dari seluruh total *item* pengungkapan yang diharapkan.

Tabel 2
Statsistik Deskriptif Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Komposisi Dewan Komisaris, Return on Investment, Leverage, dan Pengungkapan Sukarela

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
K3	101	3,14	99,50	50,1070	23,02721
LOGPNJ	101	4,44	7,67	5,7605	0,60043

BOD	101	0,00	66,66	35,8843	11,34982
ROI	101	-0,17	0,94	0,0497	0,11640
LEV	101	5,29	70,24	2,5712	7,98476
PS	101	13,20	73,50	37,5178	13,96605
Valid N (listwise)	101				

Tabel 3 menunjukkan terdapat 75 perusahaan (74,3%) diaudit oleh KAP non spesialis (*dummy*, audit = 0), dan 26 perusahaan (25,7%) diaudit oleh KAP spesialis (*dummy*, audit=1).

Tabel 3
Statistik Deskriptif Spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik

	<i>Firm Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Non Spesialis KAP	75	73,5	74,3	74,3
Spesialis KAP	26	25,5	25,7	100,0
Total	101	99,0	100,0	
Missing System	1	1,0		
Total	102	100,0		

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan pengujian data terhadap ketiga kaidah yang mendasari asumsi klasik, diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Model analisis tersebut tidak terjadi multikolinieritas, memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10 ($VIF < 10$); (b) Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser (Gujarati 2003), seluruh koefisien regresi variabel independen disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena koefisien regresi variabel bebas terhadap nilai *absolut disturbance error* tidak signifikan (nilai $SIG > 0,05$); (c) selanjutnya uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov di mana pada bagian uji ini disimpulkan bahwa data penelitian relatif berdistribusi normal. Tabel 4 menyajikan ringkasan hasil regresi.

Tabel 4
Ringkasan Hasil Regresi Variabel Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran perusahaan, Komposisi Dewan Komisaris, Spesialisasi Industri KAP, ROI, dan Leverage terhadap Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Variabel Dependen Pengungkapan Sukarela		
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficient</i>	Signifikansi
Variabel independen			
Konsentrasi Kepemilikan (KS)	0,098	0,167	0,087*
Ukuran Perusahaan (LOG PNJ)	11,449	0,492	0,000***
Komposisi dewan komisaris (BOD)	0,110	0,089	0,316
Var. <i>dummy</i> Spesialisasi industri KAP (AUDIT)	5,971	0,188	0,035**
<i>Return on Investment</i> (ROI)	10,820	0,165	0,094*
Leverage	-0,006	-0,002	0,981
<i>Adjusted R square</i> = 0,274			
F = 7,278			
<i>F.test</i> signifikansi = 0,000***			
Koefisien korelasi KS dengan PS= 0,172.			

Keterangan: * signifikan pada tingkat 0,1; ** signifikan pada tingkat 0,05; dan *** signifikan pada tingkat 0,01.

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Sukarela

Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel konsentrasi kepemilikan adalah 0,098 dengan tingkat signifikansi 0,087. Koefisien tersebut bertanda positif menunjukkan arah hubungan positif, sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Jika memperhatikan tingkat signifikansi, berarti konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada tingkat signifikansi 0,1. Dengan demikian, hipotesis kesatu yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hal ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh pemegang saham mayoritas (terbesar), maka semakin meningkat pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan emiten.

Berdasarkan Tabel 4, koefisien regresi konsentrasi kepemilikan adalah 0,098 dengan koefisien korelasi 0,172. Meskipun secara statistik signifikan pada 0,1 namun demikian konsentrasi kepemilikan hanya mampu menjelaskan secara langsung 2,92% variasi pengungkapan sukarela, sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Beberapa alasan yang dapat digunakan mengapa pemegang saham mayoritas tidak

terlalu tertarik terhadap pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: (1) Pemegang saham pengendali tidak terlalu tertarik dengan pengungkapan pada pelaporan keuangan karena mereka dapat mengakses informasi yang diperlukan secara langsung ke perusahaan tanpa melalui laporan keuangan dan laporan tahunan; dan (2) sebagai strategi dalam persaingan, beberapa informasi penting sengaja ditahan oleh manajemen dan atau pemegang saham mayoritas untuk menghindari dimanfaatkannya informasi tersebut oleh para pesaing perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela

Sebagaimana tersaji pada Tabel 4, koefisien regresi ukuran perusahaan menunjukkan sebesar 11,449 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan memperhatikan tingkat signifikansi, maka ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada tingkat signifikansi 0,01. Koefisien bertanda positif menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan, maka pengungkapan sukarela semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hal ini bermakna bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin meningkat pengungkapan sukarela. Hasil temuan penelitian ini konsisten dengan Marwata (2001), Haniffa dan Cooke (2002), serta Leung et al. (2005) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan sukarela.

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

Sebagaimana disajikan pada Tabel 4, koefisien regresi komposisi dewan komisaris menunjukkan nilai sebesar 0,110 dengan tingkat signifikansi 0,316. Koefisien regresi bertanda positif, menunjukkan variabel komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan sukarela, sesuai dengan teori. Namun jika memperhatikan tingkat signifikansi, berarti komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela ditolak.

Hasil penelitian yang menunjukkan lemahnya hubungan komposisi dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela dapat disebabkan oleh: (1) Rendahnya komposisi komisaris independen dalam dewan komisaris, data statistik menunjukkan rata-rata jumlah komisaris independen sebesar 35,80% dari jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi komisaris independen; dan (2) Masih banyak emiten menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan, dari 46 emiten yang melaporkan latar belakang komisaris independen, terdapat 43,40% emiten

menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Pengaruh Kualitas Audit dengan Proksi Spesialisasi Industri KAP terhadap Pengungkapan Sukarela

Sebagaimana tersaji pada Tabel 4, koefisien regresi spesialisasi industri KAP menunjukkan sebesar 5,971 dengan tingkat signifikansi 0,035. Jika memperhatikan tingkat signifikansinya, berarti spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada tingkat signifikansi 0,05 sesuai dengan teori. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hal ini berarti bahwa penggunaan KAP spesialisasi industri pada audit keuangan perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan sukarela. Hal ini mengindikasikan bahwa : (a) pengalaman serta pengetahuan KAP spesialis tentang industri dan kebijakan penyajian pelaporan keuangan perusahaan industri, telah dimanfaatkan oleh klien dalam rangka pengembangan kebijakan pengungkapan di perusahaannya; (b) dalam rangka menjaga reputasi, menghindari litigasi, dan kegagalan audit, KAP spesialis mendorong kliennya untuk memberikan pengungkapan tambahan.

Berdasarkan *review* terhadap penelitian sebelumnya, hasil temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Dunn dan Mayhew (2004) serta Schauer (2004) yang menyatakan bahwa spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Peter et al. (2005) disebabkan oleh perbedaan dalam pengukuran pengungkapan sukarela. Peter et al. dalam penelitiannya menggunakan instrumen untuk mengukur praktik pengungkapan tentang produk dan turunannya (*derivative product*) dengan berbagai aspeknya, di antaranya pengungkapan atas pengelompokan produk derivatif, pengaruh fluktuasi harga produk derivatif, laba atau rugi derivatif, nilai produk derivatif, dan sebagainya. Dengan demikian, instrumen penelitian Peter tidak cocok apabila digunakan untuk mengukur praktik pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan. Sedangkan instrumen pengungkapan pada penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur praktik pengungkapan secara umum pada pelaporan keuangan. Jika dilihat dari tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyampaikan informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, maka instrumen pengungkapan yang digunakan pada penelitian ini lebih valid bila dibandingkan dengan instrumen penelitian Peter et al. (2005) sebab instrumen yang dikembangkan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur berbagai aspek informasi yang selayaknya diungkapkan pada pelaporan keuangan.

Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pengendali profitabilitas yang diukur dengan ROI berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela pada tingkat signifikansi 0,1. Sedangkan variabel pengendali *leverage* yang diukur dengan rasio hutang terhadap modal saham menunjukkan hubungan yang tidak signifikan pada tingkat 0,1.

Uji Sensitivitas

Uji sensitivitas dilakukan dengan mengganti rasio hutang terhadap modal (*leverage*) dengan ukuran rasio hutang terhadap total aset (DEBT). Tabel 5 menyajikan hasil regresi uji sensitivitas.

Tabel 5
Regresi Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Komposisi Dewan Komisaris, Audit, ROI, dan Debt terhadap Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Variabel Dependen Pengungkapan Sukarela		
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficient</i>	Signifikansi
Variabel independen			
Konsentrasi Kepemilikan (KS)	0,109	0,178	0,081*
Ukuran Perusahaan (LOG PNJ)	11,337	0,487	0,000***
Komposisi dewan komisaris (BOD)	0,104	0,085	0,336
Var. <i>dummy</i> Spesialisasi industri KAP (AUDIT)	5,899	0,186	0,033**
<i>Return on Investment</i> (ROI)	10,241	0,152	0,095*
DEBT	-3,645	-0,089	0,301

Keterangan: * signifikan pada tingkat 0,1; ** signifikan pada tingkat 0,05; dan *** signifikan pada tingkat 0,01.

Pada Tabel 5, tampak koefisien regresi rasio hutang terhadap total aset (DEBT) adalah -3,645, pada tingkat signifikansi 0,05, koefisien ini menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara DEBT dengan pengungkapan sukarela. Sementara hubungan variabel independen lainnya dengan pengungkapan sukarela memberikan hasil yang tidak berbeda dengan model sebelumnya. Dengan demikian, uji sensitivitas menunjukkan hasil yang sama, yaitu: konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, spesialisasi industri KAP, dan variabel pengendali *return on investment* (ROI) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Ini bermakna semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, maka semakin tinggi pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan. Dalam rangka pengendalian kebijakan pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme *corporate governance* di perusahaan.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Ini bermakna semakin besar ukuran perusahaan, maka pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan semakin meningkat. Ini mengindikasikan perusahaan (besar) yang banyak disorot oleh publik dan analis pasar modal akan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil.
3. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Komposisi dewan komisaris menunjukkan arah hubungan positif dengan pengungkapan sukarela, tetapi tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh: (a) rendahnya komposisi dewan komisaris, data statistik menunjukkan rata-rata komposisi dewan komisaris 35,80%; dan (b) masih banyak komisaris independen perusahaan yang belum memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan.
4. Kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Ini bermakna bahwa kualitas audit dapat meningkatkan pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan, maka diajukan saran-saran untuk kepentingan pengembangan ilmu sebagai berikut:

1. Variabel konsentrasi kepemilikan pada penelitian ini menggunakan ukuran kepemilikan saham mayoritas pada individu. Dalam kenyataannya, dapat terjadi manajemen dikendalikan oleh sekelompok pemegang saham pengendali secara kolektif. Untuk itu, peneliti berikutnya perlu mencoba menggunakan proksi konsentrasi kepemilikan oleh kelompok tertentu misal, kepemilikan oleh keluarga atau kepemilikan oleh kelompok bisnis yang memiliki kesamaan kepentingan.
2. Peneliti yang akan datang disarankan menganalisis karakteristik lain dari dewan komisaris selain karakteristik komposisi dewan, di antaranya kompetensi dewan komisaris.

3. Rendahnya pengungkapan sukarela oleh emiten di pasar modal, rata-rata 43,70%, tentu akan memberikan dampak yang kurang baik untuk perkembangan pasar modal di Indonesia. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan emiten untuk memberikan pengungkapan pada laporan tahunan.
4. Pengukuran variabel pengungkapan sukarela dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan bobot relevansi *item* pengungkapan. Jika *item-item* pengungkapan diberi bobot relevansi berdasarkan prosedur tertentu, mungkin akan memberikan hasil pengukuran pengungkapan sukarela yang berbeda serta hasil penelitian yang berbeda. Untuk itu, peneliti yang akan datang disarankan memberikan bobot relevansi terhadap *item* pengungkapan sukarela.

Saran yang diajukan untuk perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi dengan lebih meningkatkan pengungkapan pada pelaporan keuangan.
2. Konsentrasi kepemilikan saham oleh pemegang saham mayoritas dapat dijadikan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan.
3. Untuk mendukung efektivitas pengendalian terhadap proses penyusunan laporan keuangan, diperlukan suatu dewan komisaris yang memiliki karakteristik independen, kompeten dalam bidang akuntansi dan atau keuangan, serta kredibel baik secara individu maupun secara institusi.
4. Hasil penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas audit yang diproksi dengan spesialisasi industri KAP terhadap pengungkapan sukarela memberikan bukti empiris terhadap para praktisi, perusahaan, dan regulator bahwa audit yang berkualitas dapat dijadikan model mekanisme *corporate governance* terhadap praktek pengungkapan pada pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Babic, Verica. "Corporate Governance Problem in Transition Economies." *Ekonomist* 33, no.2 (2005): 133-143.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan*. Jakarta: 1996.
- Bailey, B et al. "The Economic Consequences of Increased Disclosure: Evidence from International Cross Listing." Working Paper. Cornell University at alwbb @ cornel.edu, 2005.

- Barnhart, Scott and Stuart Rosentein. "Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis." *The Financial Review* 33 (November 1998): 4.
- Beneish, M.D. "Earnings Management: A Perspective." *Management Finance* 27, no.12 (2001).
- Botosan, C. "Disclosure Level and The Cost of Equity Capital." *The Accounting Review* 72, no.3(July 1997): 323-349.
- Budiwijtaksono, Gideon S. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dan Dampaknya pada Kualitas Laba." Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2005.
- Chau, Gerald K. and Sidney J. Gray. "Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hongkong and Singapore." *The International Journal of Accounting* 37 (2002): 247-267.
- Chen, Gongmeng, Michael Firth, Daniel N. Gao, and Oliver M. Rui. "Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China." *Journal of Corporate Finance* XX (2005).
- Chen, Key Y., Kuen Lin Lin, and Jian Zhou. "Audit Quality and Earnings Management for Taiwan IPO Firms." *Managerial Auditing Journal* 20, no.1 (2005): 86-104.
- Cheng, Eugene C.M. and Stephen M.C. "Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure." Working Paper Research Projects, Nanyang Technological University, 2004.
- Choi, Frederik D.S. *International Accounting 2nd*. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1992.
- Craswell, Allen T., Jere R. Francis, and Stephen L. Taylor. "Auditor Brand Name and Reputations and Industry Specialization." *Journal of Accounting and Economics* 20 (1995): 297-322.
- Dallas, George. *Governance and Risk. Analytical Hand books for Investors, Managers, Directors and Stakeholders*. New York: McGraw Hill, 2004.
- Dunn, Kimberly A. and Brian W. Mayhew. "Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality." *Review of Accounting Studies* 9 (2004): pp 35-58.
- Financial Accounting Standards Boards. *Accounting Standards; Statement of Financial Accounting Concept*. New York: McGrawHill, 1983.
- Fitriany. "Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta." SNA IV, Bandung, 2001.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 3rd Jilid 1*. Jakarta: FCGI, 2004.

- Gunawan, Yuniarti. "Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta." Simposium Nasional Akuntansi III, IAI, Depok, Jakarta, 2000.
- Hair, J.R., Joseph Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, and William G. Black. *Multivariate Data Analysis 4th*. New Jersey: Prentice Hall International Inc., 1995.
- Halim, Julia, Carmel Meiden, and Rudolf Lumban Tobing. "Pengaruh Manajemen Laba pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk pada LQ-45." SNA VIII, Ikatan Akuntan Indonesia, Solo, 2005.
- Haniffa, R.M and T.E. Cooke. "Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporation." *ABACUS* 38, no.3 (2002).
- Healy, P.M and Krisnan G. Palepu. "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and Capital Market. A Review of Empirical Disclosure Literature." *Journal of Accounting and Economic* 31 (2001): 405-440.
- Hubert, Ooghe and Tine De Langhe. "The Anglo-American versus the Continental European Corporate Governance Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium." *European Business Review* 14, no.6 (2002): 437-449.
- Jiambalvo, James. "Causes and Consequences of Earning Manipulation : An Analysis of Firms Subject to Enforcement Action by the SEC." *Contemporary Accounting Research* 13, no.1 (1996): 37-47.
- La Porta, R.F. and Lopez-de Silanes. "Corporate Ownership around the Word." *Journal of Finance* 54 (1999): 471-518.
- Lakhal, Faten. "Voluntary Earnings Disclosure and Corporate Governance: Evidence from France." Working Paper, Institute de Recherche en Gestion and ESA Universite Paris XII, 2004.
- Lueng ,C. Stephen et al. "Determinants of Corporate Disclosure and Transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand." City University of Hong Kong, 2005.
- Marwata. "Hubungan Karakteristik Perusahaan dan Kualitis Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Prusahaan Publik di Indonesia." Simposium Nasional Akuntansi IV, Ikatan Akuntan Indonesia, 2001.
- Mayangsari, Sekar. "Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan." Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 2003.
- Mohd, N. Norita and Shamsul Nahar Abdullah. "Voluntary Disclosure and Corporate Governance among Financially Distresses Firms in Malaysia." Monash University Malaysia, 2005.

- Monks, R.A.G and N. Minow. *Corporate Governance 2nd*. Blackwell Publishing, 2001.
- Peters, Gary F., Lawrence J. Abbott, and Susan Parker. "Voluntary Disclosure and Auditor Specialization: The Case of Commodity Derivative Disclosure." Working Paper. University of Georgia, 2005.
- Schauer, Paul C. "The Effect of Industry Specialization on Audit Quality : An Examination Using Bid-ask Spreads." Artikel Ringkasan Disertasi, Departmen of Accounting and MIS Bowling Green State University Bowling Green, Ohio, 2000.
- Siregar, Sylvia Veronica N.P and Siddharta Utama. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba." Simposium Nasional Akuntansi VIII, Ikatan Akuntan Indonesia, 2005.
- Susilowati, Isabelly, Richrd D. Morris, and Sidney J. Gray. "Factors influencing Corporate Transparency: A Comparative Empirical." University Working Paper, 2005. disertasi.Sidney.i.susilowati@econ.usyd.edu.au
- Tjager. *Corporate Governance. Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo, 2003.
- Utami, Wiwik. "Dampak Pengungkapan Sukarela dan Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas dengan Asimetri Informasi sebagai Variabel Intervening." Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005.
- Willekens, Marleen, Heidi Vader Bauhede, Ann Gaeremynck, and Linda Van De Gucht. "The Impact of Internal and External Governance Mechanisms on the Voluntary Disclosure of Financial and Non-financial Performance." Marleen. <http://willekens@econ.kulueven.ac.be> (2003).
- World Bank. "Corporate Governance: Framework for Implementation, Overview." World Bank. <http://www.worldbank.org.pp.5>(1999).
- _____. "Kriteria Penilaian *Annual Report Award* 2006." Bapepam. http://www.bapepam.go.id/profil/news/2006_maret/ara_2006.htm (March, 2006)
- _____. "Laporan Tahunan 2004, *Anunual Report*." Bapepam. <http://www.bapepam.go.id> (2005).
- _____. *Pedoman penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Manufaktur*. Jakarta: 2002.
- _____. "Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)." FCGI. <http://fcgi.or.id> (2006).
- _____. "Statement of Financial Accounting Concepts No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises." Stanford, Connecticut, November, 1997.

LAMPIRAN : DAFTAR PENGUNGKAPAN SUKARELA

(1) Informasi Umum Perusahaan

1. Sejarah singkat perusahaan (a,b,c,d,e)
2. Struktur organisasi perusahaan (a,b,c,d,e)
3. Deskripsi tentang produk atau jasa utama yang dihasilkan perusahaan (d)

(2) Profil Perusahaan

1. Visi dan misi perusahaan: (i) penjelasan Visi, (ii) penjelasan misi (a,b,c,d)
2. *Statement*/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan secara umum (a,b,c,d,e)
3. *Statement*/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek pemasaran (b,d)
4. *Statement*/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek finansial (b,d)
5. *Statement*/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek sosial (b,d)
6. Uraian dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan/atau masa yang akan datang (b,d)
7. Komposisi kepemilikan saham; (i) nama pemegang saham dan (ii) persentase kepemilikan untuk kepemilikan lebih dari 5% dan direktur dan komisaris, (iii) persentase atau jumlah kepemilikan saham masyarakat yang kurang dari 5%, (a,c)
8. Kronologis pencatatan saham dan atau efek lainnya; (i) kronologis, (ii) jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah, (iii) perubahan jumlah dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, (iv) nama bursa dimana saham/efek dicatatkan, (v) khusus untuk efek, informasi peringkat efek. (a)

(3) Ikhtisar Keuangan

1. Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif atau kuantitatif (b,d)
2. Pernyataan mengenai kebijakan dividen selama dua tahun buku terakhir; (i) jumlah dividen untuk masing-masing tahun, (ii) besarnya dividen kas per saham. (a,b,d)
3. Penjelasan dampak inflasi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang. (b,d)
4. Penjelasan dampak inflasi terhadap nilai aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang (b,d)
5. Kebijakan harga transfer (b)

6. Data statistik atau *trend*; (i) jumlah penjualan , (ii) harga jual per unit (e)
7. Data statistik pertumbuhan penjualan dalam unit.(e)

(4) Informasi Komisaris dan Direksi Perusahaan

1. Remunerasi; (i) komisaris, (ii) direksi (a,b,c)
2. Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional diantara dewan komisaris dan direksi. (b,d)

(5) Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

1. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen aktiva meliputi; (i) aktiva lancar, (ii) aktiva tidak lancar, (iii) jumlah aktiva (a,c)
2. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen kewajiban meliputi: (i) kewajiban lancar, (ii) kewajiban tidak lancar, (iii) jumlah kewajiban. (a,c)
3. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen ekuitas (a,c)
4. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahunan yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen penjualan (a,c)
5. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen beban usaha; (i) harga pokok penjualan, (ii) biaya administrasi, (iii) pemasaran. (a,c)
6. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen laba bersih (a,c)
7. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan serta laba operasi perusahaan minimal dalam dua tahun terakhir, atau sejak perusahaan didirikan (a)
8. Deskripsi kinerja produksi/operasi, yaitu uraian mengenai pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan atau kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang akan datang (b, d)
9. Deskripsi kinerja pemasaran secara kualitatif atau kuantitatif; (i) analisis pangsa pasar, (ii) analisis pesaing (b,c,d)

10. Deskripsi distribusi, yaitu uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa perusahaan (b,c,d)
11. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan variabel (d)
12. Uraian perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan.

(6) Informasi Tentang Proyeksi dan Prospek Bisnis

1. Peramalan (proyeksi) penjualan atau *market share* dapat secara kualitatif atau kuantitatif
2. Peramalan (proyeksi) laba dapat secara kualitatif atau kuantitatif
3. Peramalan *cash flow* dapat secara kualitatif atau kuantitatif
4. Deskripsi asumsi yang mendasari proyeksi yang dibuat perusahaan
5. Deskripsi kegiatan riset dan pengembangan dapat meliputi yang telah dilaksanakan dan atau yang akan dilaksanakan meliputi: (i) kebijakan, (ii) lokasi aktivitas, (iii) jumlah personal yang dilibatkan, (iv) hasil yang dicapai/diharapkan (c,d)
6. Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau yang akan dilaksanakan (a,b,c,d)
7. Deskripsi tentang prospek bisnis perusahaan kedepan dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi, industri, pasar (lokal, regional, internasional) dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b)

(7) Informasi Karyawan

1. Jumlah karyawan (a,b,c,d,e)
2. Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan /kompetensi (a,b,c,d)
3. Pelatihan (training) pegawai (b,c,d)
4. Kompensasi dan upah minimum pegawai (b,c,d,e)
5. Jaminan sosial tenaga kerja (b,c,d)
6. Dana pensiun karyawan (b,c)
7. *Statement* kebijakan perusahaan mengenai kesempatan yang sama terhadap karyawan tanpa memandang suku, agama, dan ras (b,d)
8. Uraian kondisi mengenai kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja (b,d)
9. Perubahan jumlah pegawai, penjelasan mengenai perubahan jumlah pegawai (b)
10. Penghargaan (*reward*) prestasi kerja (d)

(8) Kebijakan dan Tanggung Jawab Sosial

1. Jaminan kualitas produk (b,c,d)
2. Komplain pelanggan (c)

3. Sertifikasi produk tingkat nasional, internasional (a,c)
4. Deskripsi pengendalian polusi dan kerusakan lingkungan dapat secara kualitatif atau kuantitatif (b,c)
5. Menyediakan/membangun fasilitas sosial di lingkungan perusahaan (b,c)
6. Mendukung program pemerintah di bidang sosial/kesehatan masyarakat/kegiatan olah raga (b,c)
7. Beasiswa sekolah/kuliah/riset (c)

(9) Informasi Tata Kelola Perusahaan

1. Uraian pelaksanaan tugas komisaris meliputi; (i) frekuensi pertemuan komisaris, (ii) tingkat kehadiran dewan komisaris dalam pertemuan.(a)
2. Deskripsi pelaksanaan tugas dewan komisaris (a)
3. Jumlah komisaris independen (a,c)
4. Latar belakang komisaris independen; (i) pendidikan, (ii) pengalaman (a,c)
5. Jumlah komite audit (a,c)
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit (a,c)
7. Deskripsi pelaksanaan tugas komite: (i) audit, (ii) nominasi, (iii) remunerasi, (iv) komite lainnya (jika ada)
8. Deskripsi tentang tugas dan fungsi sekretaris perusahaan; (i) nama, (ii) riwayat jabatan singkat atau latar belakang, (iii) uraian pelaksanaan tugas (a)
9. Deskripsi tentang pelaksanaan satuan pengawasan intern (SPI) tentang: (i) informasi tentang keberadaannya dalam organisasi, (ii) penjelasan tentang aktivitasnya (a)
10. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik misalnya melalui *website*, media masa, *mailing list*, buletin, dan lain-lain (a)
11. Deskripsi tentang etika perusahaan. Memuat antara lain: (i) keberadaan aturan etika di perusahaan, (ii) deskripsi aturan etika secara umum, (iii) pelaksanaan dan penegakannya, (iv) pernyataan mengenai budaya perusahaan. (a)
12. Deskripsi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada operasi perusahaan. (a, c)

(a) Bapepam dan LK, Instrumen penilaian pada annual report award ; (b) Chau and Gray; (c) Utami; (d) Suripto; (e) Botosan